

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penjabaran terkait permasalahan yang dibahas pada latar belakang terdapat beberapa konsep maupun teori yang dicantumkan oleh peneliti didasarkan sebagai acuan dalam proses pembuatan hasil di penelitian ini. Pada bagian ini terdapat pembahasan yang terkait dengan penelitian terdahulu atau disebut dengan literatur review yang mana diperoleh dari artikel atau penelitian Penelitian terdahulu yang ditulis dengan pembahasan permasalahan penulis mengenai Transformasi Kebijakan Pertanian Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Banyuwangi.

2.1 Literatur Review

Literature Review merupakan salah satu landasan dalam penelitian dan skema penyusunannya. Sebagaimana dampak yang ditimbulkan dari *literature review* adalah dapat memperkaya teori yang dapat digunakan untuk membagikan pemikiran-pemikiran terhadap sebuah masalah yang relevan dan membagikannya dengan gambaran yang nyata sebagai penyempurna dari sebuah penelitian dengan sentuhan teori maupun konsep yang berbeda dalam melakukan proses penelitian. Berikut adalah kumpulan beberapa artikel atau penelitian yang sama dengan topik masalah ini sebagai berikut:

Menurut Stock & Gardezi (2022) Teknologi yang kemudian muncul pada sistem pangan dan energi menghadirkan sebuah tata kelola masalah yang unik dalam sektor sumber daya. ditunjukkan juga bahwasanya hasil riset yang telah dilakukan menunjukkan bahwasanya ada kasus yang berbeda untuk mengkaji dua teknologi yang muncul pada sistem energi dan pangan; yang ada di India yakni taman surya dan teknologi pangan presisi yang ada di Amerika Serikat. Disamping itu, dari penelitian yang telah dilakukan oleh Elahi et al (2020) terkait dengan kebijakan publik yang berkaitan dengan produktivitas pertanian di Provinsi Punjab Pakistan yang mana dalam penelitian ini berfokus pada dampaknya terhadap produktivitas tanaman yang

ada di sana. Hasilnya menunjukkan bahwasanya terdapat sebuah perbedaan produksi yang cukup signifikan diantara para petani yang sama-sama diberikan petak lahan oleh pemerintah dengan pandangan dan porsi pendidikan yang berbeda terhadap implementasi kebijakan yang dilaksanakan.

Kontradiksi ekonomi juga berpengaruh pada sektor pertanian yang sedang berkembang, sebagaimana hasil penelitian oleh Purnomo et al (2023) yang menunjukkan bahwasanya ketimpangan sektoral akan muncul dan mempengaruhi pendapatan sektoral dengan menurunnya lini keunggulan komparatif. Banyak dinamika yang menyebabkan hal ini hingga sampai terjadi di lapangan dan diantaranya yang paling dominan adalah krisis iklim dan terlibatnya masalah pertanian yang kemudian diselesaikan dengan konsep Revolusi Hijau. Hal semacam ini tentu akan berdampak pada lini kesenjangan yang turut menyertai aspek non pertanian. Titik permasalahan yang kemudian menjadi latar belakang terjadinya masalah secara berkelanjutan adalah kurangnya nilai tambah yang kemudian dihadapi oleh petani dalam bekerja, terutama pada sektor pengelolaan pasca panen. Dari sini dapat diamati bersama bahwasanya perubahan yang mendasar terutama dari aspek penunjang produksi sangatlah penting. Terutama pada akses yang menunjang berbagai dinamika permasalahan untuk ditekan dan dapat diminimalisir dengan baik. Sebagai bentuk implementasi yang nyata dan menuju hasil yang terbaik. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Amin (2013) dalam Prayoga, (2018) telah ditunjukkan bahwasanya pengaruh perkembangan teknologi sebagai fokus utama dari konsep aplikasi ICT (*Information and Communication Technologies*) menunjukkan bahwa salah satu yang paling membutuhkan adalah bidang pertanian.

Fakta menunjukkan bahwasanya peran keputusan kebijakan pertanian cukup memiliki sebuah *standing point* yang kuat terhadap perubahan atas konsekuensi lingkungan yang telah menjadi pengetahuan yang cukup kuat di kalangan ahli kebijakan. Sebagaimana riset yang telah dilakukan oleh Ringquist et al (1995) telah menunjukkan bahwasanya hubungan konservasi tanah disertai dengan konservasi tanah yang saat itu sedang ditonjolkan untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menunjukkan pentingnya menjaga kualitas air. Dan dalam prosesnya, upaya ini

mencuri banyak perhatian dari berbagai politisi hingga sarjana yang turut serta dalam kesempatan ini. Kebijakan dalam menjalankan sebuah tindakan peningkatan serta perlindungan aspek pertanian ini bila ditinjau dari beberapa literatur di atas merupakan sebuah hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk melihat sebuah ancaman yang nyata terhadap pangan bila sampai terpinggirkan dengan berbagai konsekuensi yang harus diterima. Upaya-upaya demikian ini memang harus ditempuh dengan sungguh-sungguh dalam sebuah jalannya tata pemerintahan meski dengan tantangan yang tidak mudah. Jepang sebagai salah satu negara yang memiliki keseriusan dalam hal pertanian, tidak mau ketinggalan dari aspek kebijakan yang memihak dan melindungi kepada para petani dan lingkungan. salah satunya adalah riset oleh Sasaki et al (2021) yang menunjukkan bahwasanya pada tingkat petani terdapat beberapa dampak lingkungan yang bernilai positif maupun negatif. Yang kemudian ditinjau dari sisi analisis dampak kebijakan, maka diketahui bahwasanya kebijakan yang mendorong peningkatan produksi pertanian akan selalu menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan begitupun sebaliknya dengan pemerintah menekan lebih dominan terhadap orientasi lingkungan, maka akan lebih menurunkan nilai produksi dari target.

Ini merupakan sebuah kenyataan dari keharusan yang diterima bersama bila pemerintah terlalu menekankan produksi, maka yang akan ada konsekuensi lain yang menunjukkan bahwasanya lingkungan alam yang juga akan dikorbankan demi terwujudnya target produksi yang akan dicapai. Tetapi dalam perjalanannya dalam negara berkembang seperti di Indonesia, berdasarkan temuan dari Sadono (2008) bahwasanya ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan berbagai target sebagai alat produksi yang akan mewujudkan berbagai capaian salah satunya adalah swasembada pangan terutama untuk mewujudkan kecukupan produksi beras di dalam negeri. Usaha ini salah satu dari bagian untuk melaksanakan revolusi hijau yang menunjukkan bahwa revolusi hijau dapat menjadi alat produksi yang sekaligus dapat menjadi proses peningkatan produktivitas lahan secara jangka panjang dengan berbagai usaha lain yang menyertai.

2.2 Transformasi

Menurut Nasukah & Winarti (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa transformasi merupakan sebuah perubahan yang mendasar melalui komposisi atau struktur, penampilan, atau karakter dari sebuah kondisi. Dari temuan yang telah didapatkan, ada beberapa karakteristik perubahan atau transformasi dalam komposisi atau struktur didalamnya. Selanjutnya, transformasi melibatkan perubahan dari tampilan yang tampak dari luar. Dan yang ketiga yakni perubahan dari sisi sifat atau esensi yang mengakibatkan karakter berubah dalam kondisi tertentu.

Sedangkan secara umum menurut Shirvani (1976) dalam kamus (*The New Groiler Webster International dictionary of English Language*) yang dikutip dalam Shobri et al (2022) menunjukkan bahwasanya transformasi merupakan bentuk yang berbeda dari sebelumnya namun masih memiliki nilai yang sama, perubahan yang menjadi suatu bentuk ungkapan dari mulai struktur permukaan dan fungsi. Dalam temuan penelitian ini dijelaskan bahwa transformasi kebijakan yang terjadi dari peraturan bupati di daerah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang melatar belakangi, diantaranya adalah perlunya masyarakat melaksanakan disiplin hidup sehat untuk menjamin kesehatan tetap terjaga selama masa pandemi. Selain itu, dijelaskan juga terkait dengan ketentuan hukum sebelumnya dalam peraturan bupati yang juga terdapat beberapa sanksi yang mengikat yakni denda dan kemudian produk hukum itu dimasukkan dalam sebuah peraturan daerah untuk menghindari konflik secara hukum. Seiring dengan diterapkannya kebijakan ini masyarakat di daerah Musi Banyuasin juga mulai sadar terkait dengan sikap kepatuhan dengan cara bersikap lebih bersih dan disiplin dengan menaati berbagai peraturan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan bersama.

Dalam konteks kebijakan dalam bisnis pertanian, menurut Bennike et al (2020) menyatakan bahwa transformasi terutama dalam konteks transformasi agraria sangat identik dengan dinamika manuver dari kekuatan yang mengatur terkait dengan perubahan kepentingan yang sedang diperjuangkan oleh pihak diluar. Dalam artian, misalnya tindakan perubahan yang terjadi dalam konteks agraria yang cenderung singkat dan tanpa melibatkan masyarakat secara masif berarti merupakan hal yang

cukup kuat bahwasanya ada kepentingan perubahan yang akan ditanggung oleh pihak dari luar masyarakat. Bentuk transformasi dalam konteks sebuah pembelajaran menurut Dubouloz et al (2010) adalah sebuah proses pemahaman yang menawarkan rencana kerja baru terhadap sebuah perubahan yang akan terjadi dalam prosesnya. Dalam temuan penelitiannya, dijelaskan bahwa model dalam transformasi rehabilitasi ini memberi sebuah kerangka kerja bagi penyedia layanan kesehatan untuk memahami sebuah proses yang cukup kompleks terkait dengan penyakit kronis atau disabilitas selama proses rehabilitasi. Kerangka kebijakan semacam ini juga memberikan kerangka praktis yang berguna bagi penyedia layanan kesehatan untuk memberikan penguatan terhadap individu yang kemungkinan belum siap dalam terlibatnya proses transformasi. Model penyedia layanan kesehatan dalam hal ini dalam menjadikan berbagai proses transformasi potensial bagi pasien untuk hasil kesehatan yang tak terbatas dengan semakin maju meski dengan tantangan yang cukup statis.

Sisi transformasi dalam penyusunan ini memiliki perbedaan dari apa yang telah dilakukan oleh Tarigan (2016) penelitian yang dilaksanakan di Bali menunjukkan bahwa perubahan utama yang terjadi disana berfokus pada sektor pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat di Bali yang sebelumnya menjalankan pertanian sebagai salah satu pekerjaan utama, yang kemudian saat itu berganti menjadi sektor industri dan jasa. Pertumbuhan pariwisata ini berdampak pada terjadinya penurunan kualitas udara di Bali akibat dari tingginya konsumsi rumah tangga dan peningkatan fasilitas pariwisata. Dalam penelitian ini, transformasi atau perubahan yang penyusun dalami berfokus pada sisi regulasi terhadap penguatan aspek pertanian yang berjalan di Kabupaten Banyuwangi. Menurut penelitian yang telah disampaikan, di Bali fokus pengembangan ekonomi bertumpu pada aspek industri jasa dan pariwisata. Inilah yang kemudian menjadi pengaruh paling dominan atas optimalisasi sumber daya lahan dan air yang kemudian berdampak pada krisis air di Bali. Selain itu, pembangunan fisik yang melibatkan penggunaan energi ini juga menjadi berbagai pariwisata untuk dioptimalkan yang berakibat terjadinya perubahan

secara ekologis yang kemudian mendorong transformasi sosial ekonomi dan budaya masyarakat dari sisi pertanian ke sektor industri jasa dan pariwisata.

Menurut Lazarevic et al (2022) transformasi merupakan sebuah kebijakan yang berlandaskan dengan inovasi dan pengembangan yang berdasarkan dengan kebutuhan untuk mengatasi implikasi perubahan sosio-ekonomi yang lebih luas dari proses yang terjadi. Menurutnya, berjalannya transformasi juga melibatkan berbagai dampak kekuasaan, koordinasi kebijakan dan perubahan konsep baik dari luar maupun penguasa itu sendiri. Termasuk juga keadaan sosial dan ekonomi yang bergantung pada sektor kekuasaan juga akan berpengaruh. Di Finlandia, sebagaimana dalam penelitian yang telah dipaparkan. Ditunjukkan bahwa ada beberapa fokus yang dilakukan untuk mempercepat promosi dan percepatan inovasi untuk dapat melaksanakan ekonomi sirkular secara masif. Tujuannya, pemerintah setempat melaksanakan kebijakan ini untuk menuju arah strategi transformasi sistem yang progresif dengan bentuk pendekatan secara kooperatif di Finlandia yang dalam teknis pembuatan kebijakannya meniru rencana yang sudah ada sebelumnya. Dalam rumusannya, peneliti menemukan fakta dalam artikel yang dikemukakan. Dimulai dari fokus untuk membangun dan memelihara pasar, memperluas dan mengutamakan arus pasar, membuka kunci yang diarahkan pada sikap terbukanya kekuasaan, dan mengatasi aspek dampak dari sistem-sosio ekonomi.

2.3 Kebijakan Pertanian

Kebijakan pertanian merupakan bagian yang paling penting dalam proses kebijakan sosial dan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi dan harus dikembangkan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan baik dan maksimal untuk memastikan bahwa pertanian di desa desa berjalan dengan baik Skryl et al (2019). Tujuan utama kebijakan pertanian yang juga dikemukakan oleh Skryl (Ibid) yakni untuk mewujudkan kelembagaan yang kemudian dilaksanakan proses produksi produk yang kompetitif dengan memperhatikan peningkatan daya saing terhadap produsen pertanian terutama pada perusahaan yang terlibat. Dalam konteks pelaksanaannya di lapangan, kebijakan pertanian ini bukan hanya berbentuk sebuah

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara fisik saja, tetapi juga berbentuk pelayanan melalui dasar hukum yang benar-benar berpihak kepada petani secara nyata. Didalamnya juga dijelaskan bahwasanya bagaimana dampak pentingnya sebagai manfaat untuk petani bahwa pengetahuan lingkungan dalam konteks pertanian sangat penting dalam pengembangan ekologi. Pertama, disampaikan bahwa dasar ilmu lingkungan memungkinkan petani untuk mengambil keputusan yang berdasar pada inovasi mengenai praktik pertanian secara langsung yang mereka lakukan. Contohnya adalah cara mengelola dan menjaga kesehatan tanah sebagai modal mendasar yang harus mereka lakukan. Kedua, Pengetahuan lingkungan ada dan diketahui untuk menghargai dan menjaga lingkungan alam dari berbagai komponen-komponen yang mampu merusak berbagai prospek pertanian berkelanjutan. Ketiga, proses produksi disini merupakan sebuah dasar yang bersumber dari solusi atas rekayasa adaptif secara ekologis untuk memajukan keberlanjutan pertanian. Sebagaimana temuan dari Boyce dan Shelly (2003) dalam Bray et al (2006) menunjukkan bahwa perubahan secara sistematis melalui reforma agraria ini harus dijalankan secara maksimal untuk memberikan sebuah jaminan kepada masyarakat terkait dengan kepemilikan dan hak menggunakan lahan untuk dapat digunakan secara maksimal. Selain membuat masyarakat semakin tenang dan menjalankan usaha pertanian.

Dalam pandangan yang di sampaikan oleh Walls et al (2018) subsidi juga termasuk dalam sebuah kebijakan yang berbentuk perlindungan sosial yang penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian pada negara atau wilayah yang memiliki produktivitas rendah. Ini menunjukkan bahwasanya pemerintah dalam perjalanannya untuk mewujudkan sebuah capaian target yang telah rencanakan dengan sedemikian rupa. Di China, menurut penelitian oleh Zhan (2017) pemerintah disana memberikan berbagai insentif untuk memotivasi berbagai aspek produksi yang sedang dikerjakan oleh petani. Seperti pemberian insentif pupu, benih, hingga pestisida untuk memaksimalkan input pertanian. Skema ini telah terbukti efektif untuk menunjang dan memotivasi petani untuk memproduksi komoditas pertanian terutama yang biji-bijian yang kemudian China mengalami swasembada biji-bijian dengan model

dorongan insentif baik bagi pertanian dengan skala besar dan tidak mengorbankan petani kecil.

2.4 Ketahanan Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, ada beberapa aspek untuk mewujudkan ketahanan pangan yang harus diwujudkan untuk mewujudkan pangan yang kuat dan berkesinambungan. Diantaranya adalah, 1.) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata untuk kebutuhan masyarakat, 2.) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien untuk penerapan kebutuhan di masyarakat, 3.) Konsumsi ketersediaan pangan yang beragam serta bergizi seimbang Presiden Republik Indonesia (2012). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Martinez et al (2023) yang dilakukan di Brazil, telah menunjukkan bahwa dalam mengupayakan ketahanan pangan di Brazil pemerintah memberikan program makan di sekolah negeri yang bertujuan untuk meningkatkan aspek ketahanan pangan dan gizi seimbang bagi siswa yang bersekolah di sekolah negeri. Program ini diberi nama (PNAE) *Programa Nacional de Alimentação Escolar*. Salah satu keunikan dari kebijakan ini yakni program utama penyerapan pangan yang di produksi oleh masyarakat lokal sekitar lokasi untuk menjadi bahan baku utama program ini. Selain itu, program ini juga sudah diakui secara internasional oleh FAO pada tahun 2009 dan sebagai bukti penguatan dari program zero hunger di Amerika Latin dan Karibia. Selain itu, yang menarik dari kebijakan ini adalah langkah berani dari pemerintah untuk menjamin hasil produksi pertanian di kalangan petani lokal untuk menjamin program terlaksana dengan baik.

Kebijakan semacam ini merupakan langkah yang cukup berani diambil pemerintah untuk menjaga kesinambungan harga dan prospek pertanian lokal demi tercapainya target ketahanan pangan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Baik dari sisi pemerintah melalui pengembangan sumber daya manusia dan dari sisi petani yang bergantung pada aspek pengelolaan pasca panen. Menurut Zhan (2017) ketahanan pangan merupakan sebuah situasi dimana semua orang memiliki kecukupan dalam memenuhi kebutuhan secara akses fisik dan ekonomi yang cukup,

aman serta sehat untuk memenuhi kebutuhan makan mereka sehari-hari sebagai usaha untuk hidup sehat dan produktif.

